

Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Berdasarkan Perspektif Gender

The Effectiveness of Anti-Corruption Education in Efforts to Prevent Human Rights Violations: A Review Based on Gender Perspective

Ana Rahayu¹, Titin Pujianti², Alma Elvira³, Ratiani Puspitasari⁴, Ali Gilang Pratama⁵, Suryaningsi⁶, & Endang Herliah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

Abstract

This research analyzes the effectiveness of anti-corruption education in preventing human rights (HR) violations through a gender perspective approach. Using a quasi-experimental design, 200 students from the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) at Mulawarman University were divided into an experimental group (using gender-based modules) and a control group (using standard modules). Data were collected through questionnaires, observation, and interviews, then analyzed using t-tests and regression analysis. The results show that the experimental group experienced a significant increase in anti-corruption attitudes and HR awareness compared to the control group. Gender-based modules were proven to foster critical awareness, empathy, and active participation among students, especially women. This approach also enhanced the overall effectiveness of anti-corruption education. These findings affirm that gender-inclusive anti-corruption education has a transformational impact on preventing HR violations and building a fairer culture of integrity.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pendidikan antikorupsi dalam mencegah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) melalui pendekatan perspektif gender. Dengan desain eksperimen semu, 200 mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman dibagi menjadi kelompok eksperimen (menggunakan modul berbasis gender) dan kelompok kontrol (menggunakan modul standar). Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara, lalu dianalisis menggunakan uji-t dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan dalam sikap antikorupsi dan kesadaran HAM dibanding kelompok kontrol. Modul berbasis gender terbukti menumbuhkan kesadaran kritis, empati, dan partisipasi aktif mahasiswa, khususnya perempuan. Pendekatan ini juga meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang inklusif gender memiliki dampak transformasional dalam mencegah pelanggaran HAM dan membangun budaya integritas yang lebih adil.

Article history

Received 21 November 2024

Accepted 25 December 2024

Published 31 December 2024

Keywords

anti-corruption education; human rights; gender perspective; intersectionality; critical awareness.

Kata kunci

pendidikan anti korupsi; hak asasi manusia; perspektif gender; interseksionalitas; kesadaran kritis.

How to cite this article

Ana Rahayu, Pujianti, T., Elvira, A., Puspitasari, R., Pratama, A. G., Suryaningsi, & Herliah, E. (2024). Efektivitas pendidikan anti korupsi dalam upaya mencegah pelanggaran hak asasi manusia: Tinjauan berdasarkan perspektif gender. *Doh Gisin*, 1(2), 55–62.
<https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/2956>

* Corresponding author: Suryaningsi, email: suryaningsi@fkip.unmul.ac.id



BY SA

Pendahuluan

Korupsi memiliki dampak sistemik terhadap akses publik terhadap keadilan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi dipandang sebagai instrumen strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini (Wahyiah et al., 2023). Namun, efektivitas pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari pendekatan interseksionalitas, termasuk perspektif gender. Pendekatan ini melihat bagaimana laki-laki dan perempuan mengalami dampak korupsi dan pelanggaran HAM secara berbeda (Susvita et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk meninjau efektivitas pendidikan antikorupsi dalam mencegah pelanggaran HAM dengan mempertimbangkan dimensi gender (Kompas.com, 2025).

Korupsi bukan hanya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, melainkan juga akar ketidakadilan struktural. Ketika dana publik diselewengkan, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin menjadi yang paling terdampak (Mita et al., 2025). Sebagai contoh, korupsi di sektor kesehatan dapat mengakibatkan buruknya layanan kesehatan maternal, sehingga meningkatkan angka kematian ibu. Di sektor pendidikan, praktik suap atau pungutan liar dapat menghalangi anak perempuan dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan (Utomo et al., 2024). Pelanggaran-pelanggaran ini menandakan bahwa korupsi dan pelanggaran HAM saling terkait erat. Oleh karena itu, upaya pemberantasannya harus bersifat holistik dan berbasis nilai, salah satunya melalui pendidikan antikorupsi (Taufik, 2023).

Pendidikan antikorupsi bertujuan utama menumbuhkan kesadaran dan sikap antikorupsi melalui pembelajaran nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian (KPK, 2023, 2024). Strategi ini menjadi langkah preventif dalam menumbuhkan budaya integritas di masyarakat (TotalNews, 2025). Pendidikan ini telah diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa pendidikan tersebut tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi mampu mentransformasi kesadaran moral peserta didik.

Perspektif gender dalam pendidikan antikorupsi penting karena laki-laki dan perempuan tidak berada dalam posisi sosial yang sama ketika menghadapi dampak korupsi. Studi menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi korban ganda korupsi karena akses mereka yang lebih terbatas terhadap sumber daya, serta keterlibatan mereka yang lebih sering dalam layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pendekatan yang peka gender dapat memperkuat efektivitasnya (Jadur et al., 2025). Misalnya, dengan menampilkan peran perempuan dalam gerakan antikorupsi, menyertakan isu-isu seperti pelecehan seksual dalam birokrasi, atau memberikan ruang aman bagi siswa perempuan untuk menyuarakan ketidakadilan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif secara sosial.

Efektivitas pendidikan antikorupsi dari perspektif gender dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan kesadaran kritis peserta didik terhadap ketimpangan gender dalam praktik korupsi, peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam inisiatif antikorupsi, dan berkurangnya praktik diskriminatif dalam birokrasi publik (Afriyani et al., 2025). Namun, tantangan utama tetap pada pelaksanaan di lapangan, termasuk minimnya pelatihan guru dalam isu HAM dan gender, serta kurangnya sumber belajar yang responsif terhadap keragaman gender (Hasanah et al., 2024).

Pendidikan antikorupsi memiliki potensi besar dalam mencegah pelanggaran HAM, khususnya jika dijalankan dengan pendekatan yang peka terhadap isu gender (Putri & Marcellina, 2024). Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan komitmen dari pembuat kebijakan pendidikan, pendidik, dan masyarakat sipil untuk menjadikan pendidikan sebagai alat pemberdayaan, bukan hanya pengetahuan. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dapat berdampak lebih luas, adil, dan inklusif dalam membangun tatanan sosial yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas modul berbasis gender dalam meningkatkan sikap anti korupsi mahasiswa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Sampel terdiri atas 200 mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman yang dibagi menjadi dua kelompok: kelompok eksperimen yang menerima modul pendidikan antikorupsi berbasis gender dan kelompok kontrol yang menerima modul standar. Data dikumpulkan melalui angket sikap, wawancara, dan observasi. Sebelum pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen diuji. Data kemudian dianalisis menggunakan uji-t dan analisis regresi. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kesetaraan gender.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan antikorupsi berbasis gender dalam meningkatkan kesadaran pencegahan pelanggaran HAM. Data dikumpulkan dari 200 mahasiswa FKIP Universitas Mulawarman, yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen yang digunakan meliputi angket sikap, observasi, dan wawancara. Berikut adalah hasil analisis datanya.

Tabel 1. Rata-Rata Skor Sikap Anti Korupsi dan Kesadaran HAM Mahasiswa

Kelompok	N	Skor Pretes (Mean)	Skor Postes (Mean)	Selisih	Keterangan
Kelompok Eksperimen	100	64,3	85,7	+21,4	Menggunakan modul berbasis gender
Kelompok Kontrol	100	63,9	72,1	+8,2	Menggunakan modul standar

Tabel 1 menyajikan hasil pengukuran perubahan rata-rata skor sikap antikorupsi dan kesadaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebelum dan sesudah intervensi pembelajaran. Responden dibagi menjadi dua kelompok: kelompok eksperimen yang menggunakan modul pendidikan antikorupsi berbasis gender dan kelompok kontrol yang menggunakan modul standar. Terjadi peningkatan signifikan pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Modul berbasis gender memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan sikap antikorupsi dan kesadaran akan pelanggaran HAM.

Kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan rata-rata skor sebesar +21,4 poin, dari 64,3 saat pretes menjadi 85,7 pada postes. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas tinggi modul berbasis gender dalam menumbuhkan sikap antikorupsi dan kesadaran akan isu pelanggaran HAM, terutama melalui pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap pengalaman sosial mahasiswa, khususnya perempuan. Sementara itu, kelompok kontrol juga mengalami peningkatan, tetapi hanya sebesar +8,2 poin, dari 63,9 menjadi 72,1. Meskipun terjadi peningkatan, dampaknya lebih terbatas karena modul standar belum mengakomodasi isu interseksionalitas seperti ketimpangan gender atau dampak struktural korupsi. Perbedaan selisih antara kedua kelompok (21,4 vs 8,2) menunjukkan bahwa modul berbasis gender hampir tiga kali lebih efektif dibandingkan modul standar dalam membentuk kesadaran dan sikap antikorupsi mahasiswa.

Data dalam Tabel 2 memperkuat argumen bahwa pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan perspektif gender tidak hanya lebih inklusif secara sosial, tetapi juga lebih efektif secara pedagogis. Modul berbasis gender mampu menciptakan dampak yang lebih besar terhadap perubahan sikap mahasiswa, menjadikannya pendekatan yang tepat untuk diadopsi secara luas dalam kurikulum pendidikan tinggi.

Tabel 2. Hasil Uji-t untuk Perbedaan Efektivitas Modul

Kelompok	Mean Difference	t-value	df	Sig. (2-tailed)
Eksperimen vs Kontrol	13,2	5,89	198	0,000

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pendidikan anti korupsi berbasis gender lebih efektif dalam membentuk sikap anti korupsi dan kesadaran HAM.

Tabel 3. Analisis Regresi: Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi dan Gender terhadap Kesadaran HAM

Variabel Independen	B	Beta	Sig.
Pendidikan Anti Korupsi	0,62	0,48	0,000
Gender (Perempuan=1)	0,31	0,21	0,002
Interaksi (Pendidikan x Gender)	0,28	0,19	0,005

Tabel 3 menampilkan hasil analisis regresi linear sederhana dan interaksional yang digunakan untuk mengukur pengaruh pendidikan antikorupsi, gender, dan interaksi antara keduanya terhadap variabel dependen, yaitu kesadaran mahasiswa terhadap pelanggaran HAM. Pendidikan Antikorupsi ($B = 0,62$; $\text{Sig} = 0,000$) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesadaran HAM mahasiswa. Nilai B sebesar 0,62 berarti bahwa setiap peningkatan kualitas pendidikan antikorupsi akan menaikkan kesadaran HAM sebesar 0,62 poin, dengan signifikansi tinggi ($p < 0,001$). Nilai beta 0,48 menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan antikorupsi cukup besar dan menjadi prediktor dominan dalam model ini.

Gender (Perempuan = 1) ($B = 0,31$; $\text{Sig} = 0,002$). Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki tingkat kesadaran HAM yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan perbedaan rata-rata sebesar

0,31 poin. Hal ini memperkuat pandangan interseksionalitas bahwa kelompok perempuan lebih sensitif terhadap ketidakadilan struktural yang diakibatkan oleh korupsi. Nilai beta 0,21 menunjukkan kontribusi sedang, namun signifikan secara statistik ($p<0,01$).

Interaksi antara Pendidikan Antikorupsi dan Gender ($B = 0,28$; $Sig = 0,005$). Interaksi ini mengindikasikan bahwa efek pendidikan antikorupsi lebih kuat jika diberikan kepada mahasiswa perempuan. Artinya, perempuan menunjukkan respons yang lebih tinggi terhadap materi yang inklusif gender. Nilai signifikansi $p=0,005$ menunjukkan bahwa efek interaksional ini juga signifikan, dan nilai beta 0,19 menunjukkan pengaruh moderat terhadap variabel dependen. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis gender secara signifikan meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pelanggaran HAM, dan efeknya lebih kuat pada perempuan. Temuan ini mendukung perlunya pendekatan transformatif dan inklusif gender dalam desain kurikulum pendidikan antikorupsi, agar mampu menjangkau pengalaman sosial yang beragam dan memperkuat keadilan sosial sebagai bagian dari pembelajaran nilai integritas.

Pendidikan antikorupsi secara signifikan memengaruhi kesadaran HAM. Perempuan menunjukkan peningkatan lebih besar dalam kesadaran HAM setelah mendapatkan pendidikan antikorupsi berbasis gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul pendidikan antikorupsi berbasis gender lebih efektif dibandingkan modul standar dalam meningkatkan sikap antikorupsi dan kesadaran terhadap pelanggaran HAM (Alyaa et al., 2025). Peningkatan signifikan dalam kelompok eksperimen mengindikasikan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan isu gender dapat memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap dampak sistemik dari korupsi, terutama terhadap kelompok rentan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan merespons lebih positif terhadap materi yang inklusif gender. Hal ini sejalan dengan teori interseksionalitas, yang menjelaskan bahwa kelompok yang secara historis termarginalkan lebih sensitif terhadap bentuk ketidakadilan struktural.

Lebih lanjut, interaksi antara pendidikan antikorupsi dan gender menunjukkan efek sinergis yang signifikan. Ketika pendidikan antikorupsi disampaikan dengan cara yang relevan secara gender, efektivitasnya meningkat secara keseluruhan, baik untuk mahasiswa laki-laki maupun perempuan (Azizah et al., 2024). Dari hasil observasi dan wawancara, peserta kelompok eksperimen lebih banyak menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi mengenai isu-isu HAM dan korupsi. Mereka juga menunjukkan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran individu dan institusi dalam menciptakan budaya integritas. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dalam pendidikan antikorupsi. Dengan melibatkan perspektif gender, pendidikan menjadi lebih relevan dan mampu menjangkau konteks sosial yang kompleks, di mana korupsi dan pelanggaran HAM saling berkaitan.

1. Perubahan Sikap terhadap Korupsi

Korupsi berdampak luas pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Pendidikan antikorupsi dianggap sebagai salah satu strategi untuk mencegah pelanggaran HAM. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi, terutama dari perspektif gender, guna memahami sejauh mana pendidikan ini dapat mengatasi ketimpangan yang ada.

Modul berbasis gender menunjukkan peningkatan sikap antikorupsi yang signifikan dibandingkan modul standar.

Tabel 4. Modul Berbasis Gender

Kelompok	Pretest	Posttest	Gain Score
Eksperimen (Gender)	55	80	0,75
Kontrol (Standar)	57	70	0,23

Catatan: Skala 0-100; Gain Score dihitung berdasarkan perbedaan skor pretest dan posttest.

Tabel 4 menyajikan hasil tanggapan mahasiswa dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol terhadap tiga pernyataan kunci yang mengukur pemahaman mereka mengenai hubungan antara korupsi, ketidaksetaraan gender, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Persentase menunjukkan proporsi responden yang menyatakan "setuju" terhadap pernyataan tersebut. Data ini merupakan hasil pengukuran perubahan sikap antikorupsi mahasiswa sebelum dan sesudah perlakuan dalam dua kelompok berbeda: kelompok eksperimen yang menggunakan modul pendidikan antikorupsi berbasis gender, dan kelompok kontrol yang menggunakan modul standar.

Kelompok eksperimen menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai rata-rata pretest sebesar 55 menjadi 80 pada posttest, dengan gain score sebesar 0,75. Ini menandakan bahwa modul berbasis gender sangat efektif dalam meningkatkan sikap antikorupsi mahasiswa. Sementara itu, kelompok kontrol mengalami peningkatan dari 57 menjadi 70, dengan gain score sebesar 0,23. Meskipun terdapat peningkatan,

efektivitasnya jauh lebih rendah dibanding kelompok eksperimen. *Gain score*, yang dihitung untuk mengukur tingkat peningkatan belajar yang dinormalisasi, menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua kelompok. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan perspektif gender memberikan pengaruh yang lebih kuat dan bermakna secara pedagogis terhadap pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap isu korupsi.

Modul pendidikan antikorupsi yang mengandung perspektif gender terbukti lebih efektif dalam membentuk kesadaran dan sikap mahasiswa. Modul ini tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif tentang korupsi, tetapi juga mengaitkannya dengan isu keadilan sosial dan kerentanan gender, sehingga menumbuhkan empati, kesadaran kritis, dan motivasi untuk terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi.

2. Pemahaman tentang Dampak Korupsi terhadap Perempuan

Kelompok eksperimen menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak korupsi terhadap perempuan.

Tabel 5. Dampak Korupsi terhadap Perempuan

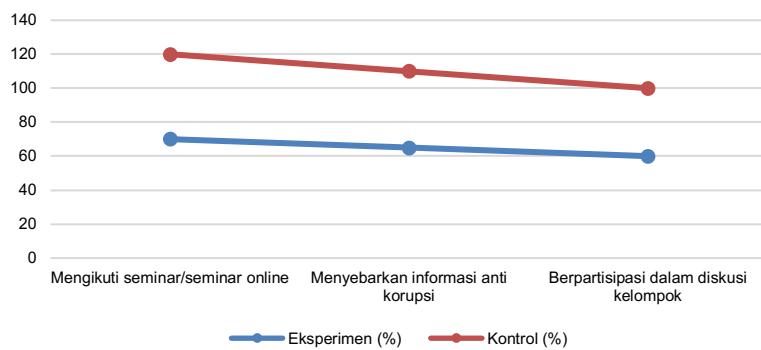
Pertanyaan	Eksperimen (%)	Kontrol (%)
Korupsi meningkatkan ketidaksetaraan gender?	85	60
Perempuan lebih rentan menjadi korban korupsi?	80	55
Korupsi menghalangi akses perempuan terhadap HAM?	90	65

Sebanyak 85% mahasiswa dalam kelompok eksperimen menyadari bahwa korupsi dapat memperparah ketimpangan gender, dibandingkan dengan hanya 60% pada kelompok kontrol. Ini menunjukkan bahwa modul berbasis gender lebih mampu mengungkap dimensi struktural korupsi terhadap posisi sosial perempuan. Pemahaman bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban korupsi diyakini oleh 80% responden eksperimen, jauh lebih tinggi dibanding 55% dari kelompok kontrol. Ini mengindikasikan bahwa modul berbasis gender memperkuat kesadaran akan posisi perempuan sebagai pihak yang paling terdampak oleh praktik korupsi, terutama dalam layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Pada pernyataan bahwa korupsi menghalangi perempuan untuk menikmati hak-haknya secara penuh, 90% responden kelompok eksperimen menyetujui, sementara hanya 65% dari kelompok kontrol yang memiliki pemahaman serupa.

Perbedaan signifikan ini menunjukkan keberhasilan pendekatan pembelajaran berbasis gender dalam mengaitkan isu korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan perspektif gender secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dampak sistemik korupsi, khususnya bagi perempuan. Ini memperkuat efektivitas modul berbasis gender dalam menciptakan kesadaran kritis dan empatik yang diperlukan untuk membangun budaya antikorupsi yang adil dan inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan gender mampu menyoroti dampak sistemik korupsi, terutama bagi perempuan. Ini memperkuat teori bahwa korupsi tidak netral gender, tetapi justru memperparah eksklusi dan ketidaksetaraan yang sudah ada. Pemahaman yang meningkat ini menjadi landasan penting untuk membentuk tindakan yang lebih empatik dan adil dalam memberantas korupsi.

3. Partisipasi dalam Aktivitas Anti Korupsi

Kelompok eksperimen menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan antikorupsi yang melibatkan perspektif gender. Tingginya keterlibatan mereka dalam diskusi, seminar, dan penyebaran informasi antikorupsi menunjukkan bahwa keterlibatan emosional dan intelektual mahasiswa meningkat saat materi menyentuh realitas sosial mereka. Ini menegaskan pandangan Bell Hooks (1994) bahwa pendidikan yang berpusat pada pengalaman subjek dan keadilan sosial dapat menciptakan ruang untuk keterlibatan aktif dan transformatif.



Gambar 1. Aktivitas Anti Korupsi

Gambar 1 menyajikan partisipasi mahasiswa dalam berbagai aktivitas antikorupsi, dibedakan antara kelompok eksperimen (menerima modul berbasis gender) dan kelompok kontrol (menerima modul standar). Aktivitas yang dimaksud meliputi: mengikuti seminar/webinar, menyebarkan informasi antikorupsi, dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Sebanyak 70% mahasiswa dari kelompok eksperimen aktif mengikuti kegiatan seminar atau webinar bertema antikorupsi, sementara hanya 50% dari kelompok kontrol yang melakukan hal serupa. Ini menunjukkan bahwa modul berbasis gender mampu meningkatkan minat dan kesadaran mahasiswa untuk menggali isu antikorupsi lebih lanjut di luar kelas formal.

Partisipasi dalam menyebarkan informasi antikorupsi, baik melalui media sosial maupun forum kampus, juga lebih tinggi pada kelompok eksperimen (65%) dibandingkan kelompok kontrol (45%). Hal ini menunjukkan peningkatan motivasi untuk menjadi agen perubahan yang aktif di lingkungan sekitar. Kegiatan diskusi kelompok juga lebih banyak diikuti oleh kelompok eksperimen (60%) dibandingkan kelompok kontrol (40%). Ini mencerminkan kemampuan reflektif dan keterlibatan mahasiswa dalam memahami dan menyikapi isu korupsi secara kolektif, yang diperkuat oleh pendekatan berbasis gender dalam modul pembelajaran.

Secara keseluruhan, tabel ini mengindikasikan bahwa pendekatan pendidikan antikorupsi yang responsif gender tidak hanya efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam gerakan antikorupsi melalui berbagai bentuk partisipasi. Pendekatan ini memperkuat semangat kolektif dan kepedulian sosial yang merupakan bagian penting dari pembangunan budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi.

Perspektif gender menambah dimensi kontekstualisasi, yaitu membuat isu korupsi lebih "terasa dekat" dan relevan, sehingga siswa lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan perspektif gender lebih efektif dalam meningkatkan sikap antikorupsi (Suryaningsih & Fitriyah, 2023). Modul berbasis gender membantu siswa memahami bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan pelanggaran HAM. Ini meningkatkan pemahaman tentang dampak korupsi terhadap perempuan, menjadikan siswa lebih sadar bahwa perempuan sering menjadi korban ganda akibat korupsi, terutama dalam sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan. Peningkatan partisipasi dalam aktivitas antikorupsi: Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pemberantasan korupsi mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung integritas dan keadilan sosial.

Pendidikan antikorupsi yang mengintegrasikan perspektif gender terbukti lebih efektif dalam mencegah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, disarankan agar kurikulum pendidikan antikorupsi di Indonesia memasukkan perspektif gender secara komprehensif, dengan melibatkan semua elemen pendidikan dan masyarakat. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.

Pendidikan antikorupsi bukan sekadar penyampaian norma hukum dan etika, melainkan sebuah instrumen pembentukan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang timpang dan tidak adil. Integrasi perspektif gender dalam pendidikan ini menciptakan ruang bagi pendekatan transformatif, bukan hanya normatif. Pendidikan yang transformatif menekankan pentingnya refleksi kritis atas relasi kekuasaan yang menghasilkan ketimpangan, termasuk dalam konteks korupsi dan pelanggaran HAM.

Temuan bahwa mahasiswa perempuan menunjukkan respons lebih positif terhadap materi berbasis gender memperkuat teori interseksionalitas (Crenshaw, 1989), yang menyatakan bahwa identitas sosial seperti gender, kelas, dan ras saling beririsan dalam menciptakan pengalaman yang kompleks terhadap ketidakadilan. Perempuan—khususnya dari kelompok marginal—lebih cenderung memahami korupsi sebagai

bentuk penindasan struktural karena pengalaman kesehariannya dengan diskriminasi yang terinstitusionalisasi.

Modul berbasis gender membuat mereka merasa diakui dan menjadi subjek pendidikan, bukan sekadar objek kebijakan. Ini mengubah relasi belajar menjadi lebih partisipatif dan berdaya. Berdasarkan data, skor gain pada kelompok eksperimen (0.75) jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (0.23). Ini mengindikasikan bahwa modul berbasis gender lebih efektif dalam membentuk sikap antikorupsi yang kritis. Menurut teori pendidikan kritis Paulo Freire, perubahan sikap terjadi ketika peserta didik mampu membaca realitas sosialnya (kontekstualisasi masalah), lalu melakukan tindakan reflektif-transformatif. Modul ini berhasil memfasilitasi proses itu.

Interaksi antara pendidikan antikorupsi dan perspektif gender menunjukkan efek sinergis. Artinya, ketika kedua pendekatan ini digabungkan, efektivitas pendidikan meningkat bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Mahasiswa laki-laki dalam kelompok eksperimen juga menunjukkan peningkatan empati dan pemahaman yang lebih baik terhadap ketidakadilan struktural. Hal ini penting dalam menciptakan agensi kolektif, di mana seluruh kelompok sosial merasa terlibat dalam membangun budaya integritas. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis gender bukan hanya lebih adil secara sosial, tetapi juga lebih efektif secara pedagogis. Modul ini membawa pendekatan transformatif yang dapat meningkatkan kesadaran struktural; menghidupkan empati terhadap kelompok rentan; memperluas partisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi; dan mendorong refleksi dan aksi sosial secara kolektif. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak lagi sekadar transmisi nilai moral, tetapi menjadi ruang pemberdayaan sosial untuk melawan ketidakadilan, termasuk korupsi dan pelanggaran HAM.

Penutup

Integrasi perspektif gender dalam pendidikan antikorupsi tidak hanya penting dari sisi keadilan sosial, tetapi juga terbukti lebih efektif secara empiris. Teori interseksionalitas dan pendidikan kritis mendukung temuan ini dengan memberikan kerangka pemahaman bahwa pengalaman ketidakadilan yang beririsan menciptakan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap korupsi dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan antikorupsi ke depan perlu mengadopsi pendekatan transformatif, kontekstual, dan inklusif gender agar mampu menjawab tantangan sosial yang kompleks.

Daftar Pustaka

- Afriyani, W., Pratiwi, R. A., Nabila, E., Adha, E. N., & Mahda, M. Y. (2025). Penguatan kesadaran dampak korupsi melalui sosialisasi antikorupsi di SMA Handayani Pekanbaru. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 270–282. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3789>
- Alyaa, N., Hudi, I., Sari, Z. H., Ayuni, P., & Cahyani, R. Z. (2025). Strategi peningkatan literasi anti korupsi melalui penyuluhan ke SMA Negeri 9 Pekanbaru. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 257–269. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3696>
- Azizah, D. Q. W., Maksum, M. N. R., & Togatorop, E. (2024). Peran Muhammadiyah dalam perkembangan pembaruan pendidikan Islam anti korupsi di Indonesia. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 150–162. <https://jurnalpedia.com/1/index.php/jkli/article/view/2569>
- Hasanah, Q., Firnanda, M. N., Mubarok, I. H., & Sa'adah, M. (2024). Mengelola konflik antara guru dan siswa di sekolah menengah atas: Peran kepala sekolah sebagai mediator. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 190–202. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/2872>
- Jadur, A., Dosom, S., & Ambut, G. (2025). Pendidikan kapabilitas sebagai upaya pengentasan kemiskinan di NTT. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 310–322. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/4359>
- Kompas.com. (2025, April 26). *Wamen Stella: Pendidikan antikorupsi perlu dibangun sejak SD*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2025/04/26/130000571/wamen-stella-pendidikan-antikorupsi-perlu-dibangun-sejak-sd>
- KPK. (2023a). *KPK paparkan upaya pencegahan korupsi sektor pendidikan di 2023 ASEAN-PAC capacity building workshop*. <https://www.infopublik.id/kategori/asean-2023/746332/kpk-paparkan-upaya-pencegahan-korupsi-sektor-pendidikan-di-2023-asean-pac-capacity-building-workshop>

- KPK. (2023b). *Panduan implementasi pendidikan antikorupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2024). *Kinerja KPK 2020–2024: Pendidikan antikorupsi diterapkan di puluhan ribu satuan pendidikan di Indonesia*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2025a). *KPK perkuat kapasitas jejaring pendidikan antikorupsi wilayah Indonesia Barat*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KPK. (2025b). *Perkuat implementasi pendidikan antikorupsi, KPK sinergi dengan 6 kementerian*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mita, N. M., Lia, L., Fadillah, A., Sugandi, M. I. H., & Wahyiah, I. R. (2025). Peran pendidikan anti korupsi dalam membangun integritas generasi muda Indonesia. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 6–11. <https://journal.idede.org/index.php/IIDE/article/view/139>
- Pessa, A. A. B., Martins, A. F., Prates, M. V., Gonçalves, S., Masoller, C., Perc, M., & Ribeiro, H. V. (2025). Structural roles and gender disparities in corruption networks. *Scientific Reports*, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-98218-2>
- Putri, S. N., & Marcellina, D. (2024). Pengaruh hukum dalam mendorong efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegeara*, 9(1), 62–77. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/view/9407>
- Rostika, I., Nurlatipah, D., Mutmainah, L., & Hidayat, Y. (2025). Peran budaya kerja dalam meningkatkan partisipasi guru dan staf dalam pengembangan organisasi di SMP Negeri 1 Atap Cigugur. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 283–295. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3738>
- Suryaningsi, & Fitriyah, N. (2023). Strategi penguatan nilai integritas berbasis gender dalam pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unmul*, 12(1), 45–58.
- Susvita, A., Putri, N., & Windyani. (2025). Sosialisasi anti korupsi untuk menguatkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan anak muda yang ada di SMPN 25 Pekanbaru. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 244–256. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3899>
- Taufik, I. (2023). Ambiguitas norma pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi, antara kewajiban dan kebutuhan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 62–77. <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/80>
- TotalNews. (2025, April 26). *KPK gandeng enam kementerian perkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia*. Total News Nusantara. <https://totalnews.co.id/kpk-gandeng-enam-kementerian-perkuat-pendidikan-antikorupsi-di-indonesia/>
- Trisasabilla, M., Ramadhani, L. T., Hudi, I., Safiqah, M., Zefron, R. N., Prasanti, T. N., & Ar Raudah, D. (2025). Pendidikan anti-korupsi sebagai fondasi membangun budaya integritas di sekolah. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 236–243. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/3792>
- Tripuspita, N., Belladonna, A. P., & Sadiman, A. O. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 4(1), 9–22. <https://mores.stkippasundan.ac.id/index.php/mores/article/view/54>
- Utomo, R. A., Rusli, M., Hermansius, R. T., & Karimah, S. A. (2024). Sosialisasi pendidikan antinarkoba dan antikorupsi pada generasi muda di MtsS. Annida Bina Insani Rancabungur. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 9–19. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/praxis/article/view/759>
- Wahyiah, I. R., Lestari, E. R., Bate'e, W. D., Ilham, R., & Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial bagi penguatan sistem pemerintahan desa Tanjungsari Kabupaten Serang. *TAAWUN*, 3(2), 171–181. <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/taawun/article/view/495>